

ONOMI  
ANGUNAN

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERLAYA**

**SKRIPSI**

**ANALISIS UPAYA (FISKAL EFFORT) PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA PALEMBANG**



**Disusun Oleh :**

**Teddy Kurniadi**

**01003120011**

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**2006**

07



S  
339.307  
Kue  
a  
2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERLAYA



SKRIPSI

ANALISIS UPAYA (FISKAL EFFORT) PENDAPATAN ASLI  
DAERAH KOTA PALEMBANG



R. 14312  
14673

Disusun Oleh :

Teddy Kurniadi

01003120011

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat

Guna Mencapai Gelar

Sarjana Ekonomi

2006

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

INDERLAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TEDDY KURNIADI  
NIM : 01003120011  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISI UPAYA (FISKAL EFFORT)  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal 5 Mei 2006

Ketua Panitia :



Dr. Didik Susetyo, Msi  
NIP : 131673869

Tanggal 5 Mei 2006

Anggota :



Drs. M. Komri Yusuf, Msi  
NIP : 130810710

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERLAYA

SKRIPSI

ANALISIS UPAYA (FISKAL EFFORT) PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA PALEMBANG

Diajukan Oleh :

TEDDY KURNIADI  
01003120011

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif

Pada tanggal 17 Mei 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

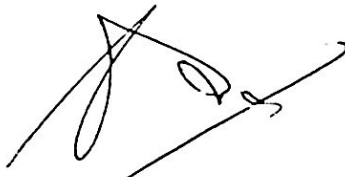
Panitia Ujian Komprehensif

Ketua



Dr. Didik Susetyo, Msi  
NIP : 131673869

Anggota



Drs. M. Komri Yusuf, Msi  
NIP : 130810210

Anggota



Dra. Hj. Enny Muhaini  
NIP : 131109615

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Drs. Suhel, M, Si  
NIP : 131993979



*Motto :*

*"Ilmu adalah pintu dari segala bentuk ibadah" (Sahl Bin Abdullah)*

*"Bergaul dengan manusia adalah separuh dari iman dan sayang kepada mereka adalah separuh kehidupan" (Rasulullah, SAW)*

*"Awali dengan senyuman akhiri dengan indah" (Dwi dan Teddy)*

**Kupersembahkan Untuk :**

- \* Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- \* Kakak-kakak ku Tersayang**
- \* Keponakan ku**
- \* Sesuatu Yang Kucintai**
- \* Sahabat-sahabat ku**

## KATA PENGANTAR

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka membiayai perekonomian, semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah. Maka semakin besar kemampuan daerah mengoptimalkan sumber-sumbernya.

Inilah yang melatar belakangi penulis untuk menganalisis apakah upaya pengumpulan dan peningkatan PAD yang dilakukan pemerintah, khususnya Kota Palembang sudah berjalan efisien dan efektif. Sehingga bisa memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, demi tercapainya tujuan Negara untuk mensejahterakan rakyat.

Melalui penelitian ini penulis juga menganalisis apakah PAD berpengaruh terhadap PDRB sebagai indikator perekonomian, yang juga dilihat dari posisi fiskalnya.

Penulis sadar bahwa hasil skripsi ini belumlah sempurna dan masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak.

Inderlaya, Mei 2006

Teddy Kurniadi



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmatnya dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisi Upaya (fiscal Effort) Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang” dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh ujian sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penyempurnaan tulisan maupun dalam kehidupan yang sederhana ini, yakni kepada :

1. PROF.DR.IR.ZAINAL RIDHO DJAFAR, SELAKU REKTOR Universitas Sriwijaya.
2. DR. SYAMSURIJAL AK, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. DRS. SUHEL,MSI, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan. Terima Kasih Atas Kepercayaannya dan terima kasih atas nasehat-nasehat nya.
4. DR. DIDIK SUSETYO,M.Si, selaku Pembimbing Skripsi I, Terima kasih yang telah mengarahkan dan membimbing hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. DRS. M. KOMRI YUSUF.M.Si, selaku Pembimbing Skripsi II, Terima kasih atas bimbingannya dan kemudahan yang telah diberikan hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
6. DRA.HJ. ENNY MUHAINI, selaku dosen penguji. Terima kasih atas masukan-masukan ibu pada saat ujian komprehensif.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih atas pengabdian dan materi kuliah yang telah diberikan.
8. Yuk semi, yuk ita dan seluruh Karyawan-karyawan Universitas Sriwijaya fakultas Ekonomi terima kasih atas bantuan dan keikhlasan membantu aktivitas akademik teddy.
9. Kedua Orang tuaku tercinta yang telah merawat, mendoakan dan membiayai dari kecil sampai sekarang. Makasih ya buat semua kesempatan yang udah dikasih ke teddy untuk menikmati pendidikan sampai bisa jadi sarjana. Semoga Allah memberikan jalan untukku membahagiakan dan membuat bangga papa dan mama.
10. Kakak-kakak ku tersayang, acan, kak party, yudi, yuk wana, evan, yuk yanti, kak andi, melly dan oetjoe (ucu) thanks a lot atas semua dukungan dan doanya, karena kalian semua teddy bisa ngebuktiin kalau teddy bisa....



11. Keponakan-keponakan ku tersayang : vira, tasya, dava, hitomi, lisa, Karina (bener gak ya?!) makasih atas buat semua kelucuan dan tingkah-tingkah kalian melipur lara hati disaat om butuh.
12. Keluarga Om Fikri Salman. Makasih atas bantuan motivasinya dan doanya selama pengerjaan skripsi ini.
13. Yuli, makasih dah ngenalin aku apa artinya kasih sayang, cinta dan lo yang terbaik dari yang terbaik yang pernah ada dalam hidupku.
14. Dwi rahayu makasih banget wie karena selalu ada buat aku, juga untuk doa dan cinta selama dua tahun. Semoga perjalanan cinta kita sesuai dengan yang kita impikan, amien.
15. M. anwar (aan) Saddat. Thanks atas kesediaan menjadi kawan diskusi selama proses pengerjaan skripsi. Sukses selalu buat aan semoga cepat tajir, carilah jodoh inget umur bung.
16. Ijal Gomess, Hosea anarki, Labet cibur, Norman Pikachu, Mantok haji, Mega joetek, aku nyusul kalian cs sukses buat kita selalu
17. Agoes joelor, Adi gondrong, Bambang, Dian poksai, irvan, Bram, Eka ciebol, Al karmani. Nih yang tersisa, tapi aku yakin nih orang-orang yang bakal sukses dimasa depan karena aku kenal kalian adalah orang-orang yang selalu berusaha keras. Aku duluan cs, senang punya saudara kayak kalian. Dan buat agoes lo yang tertua mang lo yang seharusnya yang terakhir keluar , jangan patah semangat.

18. Loeluk dan Reni walau sekarang kita dah saling jauh, makasih dah jadi cewek-cewek yang aku kenal di unsri selama aku kulliah makasih yah atas semuanya.
19. To Anak-anak angkatan 2000, Persaudaraan, Kekompakan, kalian ajarin itu sama aku. Senang bisa kenal sama kalian semua dan itu akan selalu aku ingat.
20. To Adik-adik tingkat ku dari angkatan 2001 sampai dengan 2005. Senang punya adik-adik tingkat seperti kalian. Satu hal, kalian harus jaga rasa persaudaraan kalian walaupun sampai kalian tamat nanti. Adjie, aang, halim, ista, diaz. Nih tugas buat kalian sebagai calon senior EP.
21. Himpunan Mahasiswa Pembangunan, siapa ketuanya ?! dan Badan Executip Mahasiswa, Andi (Magon) Salut buat kau! Satu suara Mahasiswa .
22. Seluruh staff karyawan Standard Chartered Bank, Makasih atas dorongan spiritnya. Maaf kalau sudah merepotkan terutama to mbk joe, maaf ya mbak kalau sudah mempertahankan teddy tapi akhirnya mengecewakan.
23. Dan semua orang- orang yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini sampai dengan selesai TERIMA KASIH atas bantuan semuanya semoga amal perbuatan semuanya dapat dibalas Tuhan Yang Maha Esa,amin.

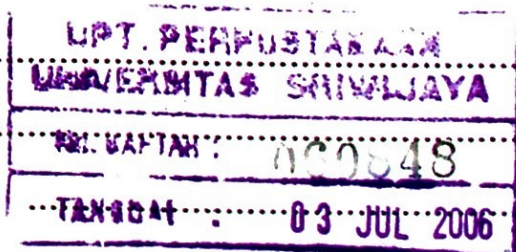


## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih .....	vi
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xiii
Daftar Gambar .....	xiv
Abstraksi .....	xv
Abstract .....	xvi

### BAB. I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	10
I.3. Manfaat Penelitian .....	10
I.4. Tujuan Penelitian .....	10
I.5. Landasan Teori .....	11
I.6. Penelitian Terdahulu .....	13
I.7. Hipotesis .....	15
I.8. Metodologi Penelitian .....	15



I.8.1. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
I.8.2. Sumber Data .....	15
I.8.3. Teknik Analisis .....	16
I.8.4. Batasan Variabel .....	19

## **BAB.II. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG**

II.1. Struktur Umum Kota Palembang .....	21
II.1.1. Kondisi Geografis dan Luas Wilayah .....	21
II.1.2. Pemerintah dan Wilayah Administrasi .....	22
II.2. Perekonomian Kota Palembang .....	24
II.2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang .....	24
II.2.2. Laju Inflasi Sektoral .....	29
II.2.3. Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Palembang .....	31
II.3. Deskripsi Variabel Yang Diteliti .....	33
II.3.1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah .....	33
II.3.2. Pajak Daerah .....	33
II.3.3. Retribusi Daerah .....	35
II.3.4. Pembagian Laba Badan Usaha Milik Daerah .....	38
II.3.5. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah .....	39
II.4. Perkembangan PDRB Kota Palembang .....	40

## **BAB.III. ANALISIS UPAYA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG**

III.1. Analisa dan Data	
III.1.1. Penerimaan Daerah Yang Mempengaruhi PAD .....	47



<b>III.2. Elastisitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perekonomian ..</b>	<b>49</b>
<b>III.2.1. Hasil Estimasi .....</b>	<b>49</b>
<b>III.2.2. Pengujian Statistik .....</b>	<b>50</b>
<b>III.2.3. Pengaruh Perkembangan Ekonomi Terhadap             Peningkatan Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>52</b>
<b>III.3. Hambatan dan Upaya Dalam Meningkatkan PAD .....</b>	<b>54</b>
<b>III.3.1. Hambatan-Hambatan .....</b>	<b>54</b>
<b>III.3.2. Upaya- Upaya .....</b>	<b>55</b>
<b>III.4. Analisis Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah .....</b>	<b>56</b>
<b>III.4.1. Tingkat Efisiensi .....</b>	<b>56</b>
<b>III.4.2. Tingkat Efektivitas .....</b>	<b>58</b>
<b>III.5. Analisa Upaya / Posisi Fiskal Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Palembang .....</b>	<b>60</b>
<b>III.5.1. Analisis Upaya Fiskal .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB. IV . KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
<b>IV.1. Kesimpulan .....</b>	<b>63</b>
<b>IV.2. Saran .....</b>	<b>64</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jarak Kota Palembang Dengan Kabupaten / Kota Lain .....	21
Tabel 2.2.	Kelurahan, Desa Per Kecamatan Kota Palembang Tahun 2004 ..	23
Tabel 2.3.	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang Tahun 1994-2004 .....	25
Tabel 2.4.	Laju Inflasi Sektoral Kota Palembang Tahun 1994-2004 .....	30
Tabel 2.5.	Perkembangan Pendapatan Perkapita Penduduk Kota Palembang .....	32
Tabel 2.6.	Perkembangan Realisasi Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang .....	34
Tabel 2.7.	Perkembangan Realisasi Retribusi Daerah Menurut Jenisnya di Kota Palembang .....	36
Tabel 2.8.	Penerimaan Pos Lain-lain Menurut Jenisnya di Kota Palembang .....	39
Tabel 2.9.	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha .....	41
Tabel 2.10.	PDRB Kota Palembang Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha .....	43
Tabel 3.1.	Kontribusi Penerimaan Daerah Terhadap PAD Kota Palembang Tahun 1994-2004 .....	48
Tabel 3.2.	Analisa F Tabel .....	51
Tabel 3.4.1.	Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang .....	57
Tabel 3.4.2.	Ukuran Tingkat Efektivitas .....	58
Tabel 3.4.3.	Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang ...	59
Tabel 3.5.1.	Pertumbuhan PAD dan PDRB Kota Palembang .....	61

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Uji T Tabel .....	50
Gambar 3.2. Uji F Tabel .....	51

## ABSTRAKSI

Skripsi ini berjudul “ Analisis Upaya (Fiskal Effort) Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang”

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian bertujuan untuk menganalisis upaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palembang. Selain untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektif PAD di Kota Palembang, serta posisi fiskal akan kemampuan keuangan daerah dilihat dari pertumbuhan PAD dan PDRB. Data yang digunakan data sekunder yang berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang.

Teknik Analisis yang digunakan efisiensi dan efektifitas, upaya fiskal dan model regresi linier. Berdasarkan hasil penelitian upaya pengumpulan PAD sudah berjalan dengan baik. Dimana pengumpulan PAD efisien sedangkan realisasi sangat efektif dan juga PDRB berpengaruh signifikan terhadap perubahan tingkat PAD.

Alis

## ABSTRACT

The title of this thesis “Analyze means (fiscal effort) Original Income Regional Palembang City”

The purpose of this research is to analyze remedy gathering Original Income Regional in the Palembang City. As well as will know degree efficient and effecty local renews in the Palembang City, and also fiscal effort regards capability financial region to see from grow Original Income Regional and Gross Domestic Regional Product that come from any source like Central Statistic Bureau and Income Regional Office Palembang City.

The technical analysis that been used in the efficiency and effectivity, fiscal effort and regression linear has ben well where unity Original Income Regional efficient exactly extremely effecty and too gross domestic regional product influenced significant to front alteration degree Original Income Regional.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah sebuah Negara yang mempunyai wilayah yang luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Dengan luasnya wilayah yang dimiliki maka pemerintah pusat memiliki banyak kesulitan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan. Akibatnya banyak daerah-daerah yang merasa tidak puas dengan pembangunan yang ada, mereka merasa bahwa pembangunan yang dilakukan sekarang ini tidak adil dan tidak merata. Karena rasa tidak puas inilah maka beberapa daerah di Indonesia menuntut untuk memisahkan diri dari Kesatuan Negara Indonesia.

Setelah reformasi pada tahun 1999, Indonesia telah mengganti sistem pemerintahannya. Sebelum reformasi Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, dimana pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan, sedangkan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya. Dengan kata lain setiap daerah di Indonesia tidak diberikan kesempatan untuk menentukan kebijakannya sendiri. Hal itu mengakibatkan rasa tidak puas dari beberapa daerah maka sistem pemerintahan berganti dengan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya dengan cara menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah masing-masing.

Oleh karena itu setiap daerah diwajibkan menggali sumber daya keuangan sendiri dengan batas-batas perundangan yang berlaku. Hal ini disebutkan dalam Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998:<sup>1</sup>

**“Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah perlu terus didorong dan ditingkatkan dengan prakarsa dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat serta peranan pemerintah daerah dalam pembangunan dan seluruh aparatur pemerintah di daerah sekaligus dalam rangka mewujudkan otonomi yang lebih nyata dan bertanggung jawab sejalan dengan itu harus ditingkatkan kemampuan daerah untuk membangun antara lain dengan menghimpun dana secara wajar dan tertib termasuk pengendalian sumber-sumber keuangan baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”**

Hal ini dapat juga berarti bahwa pembangunan daerah harus diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dengan meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Dengan kata lain, untuk mencapai pembangunan keseluruhan wilayah Indonesia, rakyat harus berpartisipasi secara aktif dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Pelaksanaan otonomi daerah secara eksplisit terlihat dengan adanya sistem pemerintahan yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten/kota serta daerah administrative yang lebih kecil yaitu kecamatan, kelurahan, dan desa. Dengan adanya pembagian daerah tersebut, sistem pemerintahan terbagi secara vertikal kedalam tingkat-tingkat daerah otonom yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan hukum yang kuat menyelenggarakan asas desentralisasi, yaitu berupa pemberian otonom kepada daerah untuk menyelenggarakan program-program pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal.

Namun dalam perjalanan sejarah Indonesia selama ini, cita-cita tersebut semakin jauh dari kenyataan yang diharapkan sehingga menimbulkan protes dan reaksi di berbagai daerah. Pada masa pemerintahan presiden Soeharto tuntutan daerah tersebut coba di atasi dengan diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pelaksanaan otonomi daerah.

Pada dataran implementasi, kebijakan otonomi daerah tersebut tidak sesuai dengan janji dan harapan bahwa nasib daerah akan menjadi lebih baik, yang terjadi adalah semakin besarnya kontrol pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah dan adanya disparitas regional dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Janji dan harapan dengan adanya UU Nomor 5 Tahun 1974 masih hanya sekedar janji politik untuk meredam tuntutan berbagai daerah yang merasa di berlakukan tidak adil.

Pemberian otonomi daerah merupakan salah satu cara pemerintah untuk dekat dengan publik yang dilayaninya. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka dari pemerintah pusat. Setelah krisis ekonomi tahun 1997, tuntutan otonomi daerah semakin vokal terdengar dan disampaikan secara formal pemerintah Habibie merespon tuntutan ini dengan merevisi UU Nomor 5 Tahun 1974 menjadi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Kemudian pada pemerintah Megawati berubah lagi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berkaitan dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar kepada daerah sebagai daerah otonom. Pengertian daerah otonom disini adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas daerah tertentu yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat juga berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat lokal.

Mengacu pada pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mencakup wewenang dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, peradilan, moneter, fiska, agama, dan pembangunan ekonomi secara makro. Disamping itu, daerah wewenang untuk mengelola sumberdaya nasional di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian hidup. Di wilayah laut kewenangan daerah meliputi eksploitasi, konsepsi dan pengelolaan daya laut sebatas wilayah laut tersebut.

Sementara itu, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan refleksi pembagian kekuasaan di bidang keuangan untuk membiayai pengeluaran daerah. Dengan mengacu pada UU tersebut maka sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas PAD, dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana perimbangan (DAU/DAK) dan lain-lain penerimaan yang sah.

Dengan berpijak pada penyelenggaraan otonomi daerah berdasar Undang-undang otonomi daerah (UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004). maka pola pengaturan hubungan keuangan pusat daerah didasarkan pada empat prinsip: urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat didaerah dalam rangka dekonsentrasi biaya dari APBN, urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi biaya dari APBD. urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan biaya oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atau beban APBD pihak yang menugaskan, sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan (Kuncoro, 2004 : 7)

Mengacu pada pandangan Bahl dan Alm dalam Sondakh (2003 : 308), proses otomasi yang sedang berlangsung menimbulkan sejumlah pertanyaan dari dua sisi. Dari sisi pemerintah pusat terdapat kecendrungan adanya sikap skeptis terhadap kemampuan daerah baik dalam kualitas sumber daya manusia (SDM) maupun keuangan dalam melaksanakan wewenangnya. Sedangkan dari sisi pemerintah daerah, terlihat adanya kecendrungan rasa percaya diri yang berlebihan, hal ini ditandai dengan adanya sejumlah daerah yang sedang giat-giatnya menuntut untuk mendirikan propinsi/kabupaten yang terpisah dari induknya. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam pelaksanaan otonomi daerah dari dua pertanyaan tersebut adalah kesiapan daerah dilihat dari keuangan daerahnya.



Kuangan daerah yang merupakan alat fiskal pemerintah daerah sebenarnya merupakan bagian integral keuangan Negara dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi, pemeratakan hasil pembangunan, dan menciptakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Peranan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin penting selain keterbatasan dana yang dapat dialihkan kedaerah dalam bentuk subsidi dan bantuan, juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah dan pemecahnya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Dengan demikian, peranan keuangan daerah semakin akan mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah secara keseluruhan. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting sebagaimana dikemukakan oleh Pamudji (dalam Kaho, 2001 : 125), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa disertai adanya sumber biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada Kota Palembang, sejalan dengan kebijaksanaan di bidang otonomi daerah dengan titik berat pada Kota Palembang.

Maka mulai saat itu juga secara perlahan-perlahan Kota Palembang mulai mengembangkan potensinya namun demikian beban tanggung jawab dan tantangan pemerintah tingkat II menjadi semakin berat, sukses tidaknya pembangunan nasional itu sendiri tergantung juga sebagai ujung tombaknya melaksanakan pembangunan. Peranan Kota Palembang menjadi sangat strategis, karena langsung berhubungan dengan masyarakat dan dapat lebih dimengerti serta memenuhi aspirasi masyarakat.

Kemandirian suatu daerah akan tercermin dari besarnya dana pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, sumbangan dana dan bantuan dari pusat, pendapatan dari perusahaan daerah yang disumbangkan dalam APBD. Semakin besar porsi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD, berarti menggambarkan kemandirian daerah yang baik, tetapi jika porsi penerimaan daerah masih didominasi oleh sumbangan atau bantuan dari pusat, berarti daerah tersebut belum dikatakan mandiri.

Dalam hal sumber keuangan, dapat juga menambahkan untuk biaya kabupaten ada sumber-sumber kabupaten yang jumlahnya terbatas. Kabupaten harus bisa mencari usaha baru sehingga kabupaten tidak bergantung pada subsidi karena hal itu menyebabkan rasa tanggung jawab dikalangan masyarakat tidak kuat.

Pemahaman akan uraian diatas akan mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa memperbesar wewenang saja tidaklah cukup tanpa menyediakan dana yang memadai untuk melaksanakannya.

Sumber penerimaan Kota Palembang menurut Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 dan pasal 6 penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi yang terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari; (1). Pendapatan Asli daerah (PAD) bersumber dari Pajak daerah, Restribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah yaitu Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jasa giro, Pendapatan bunga . Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. (2). Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum. dan Dana Bagi Hasil. (3). Lain-lain Pendapatan.

Dari sumber-sumber penerimaan daerah tersebut, penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat tinggi bagi daerah karena pendapatan ini seluruhnya digali dan berasal dari daerah itu sendiri. oleh karena itu daerah mempunyai wewenang penuh untuk memanfaatkan semua potensi yang ada didaerah secara optimal. Kebijakan yang ditempuh pemerintah daerah Kota Palembang dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD. Sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhanya semakin menurun.

Selanjutnya, berkaitan dengan hakikat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu daerah adalah PDRB. Meskipun bukan satu-satunya ukuran untuk menilai prestasi ekonomi suatu daerah, namun lingkup representatif dan sangat lazim digunakan. PDRB bukan hanya digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tapi juga dibandingkan dengan daerah lain. Bila PDRB meningkat dari tahun ketahun akan menyebabkan meningkatnya pendapatan perkapita. Tingginya nilai pendapatan perkapita mencerminkan kesejahteraan suatu daerah semakin baik, sehingga pajak yang diterima suatu daerah juga akan meningkat.

Dari uraian di atas bahwa penerimaan PAD Dati II belum, berarti walaupun ada peningkatan pada hal PAD sangat diperlukan untuk memperlancar dan meningkatkan pembiayaan pembangunan di Kota Palembang.

Begitu juga dengan Kota Palembang berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan menggali sumber daya yang ada sehingga dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang ada diungkapkan sebelumnya maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya pengumpulan PAD di Kota Palembang dalam era otonomi daerah ?
2. Bagaimana tingkat Effisiensi dan Effektivitas PAD di Kota Palembang ?
3. Bagaimana kesiapan keuangan Kota Palembang dalam menghadapi otonomi daerah dilihat dari posisi fiskal ?

## **1.3. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang berjudul Analisis Upaya (fiskal Effort) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang mempunyai beberapa manfaat antara lain untuk mengembangkan penerapan ilmu ekonomi keuangan daerah pada umumnya, khususnya mengenai sektor Pendapatan Asli Daerah, disamping itu penelitian dapat memberikan acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Dalam rangka pencapaian tujuan Effisiensi dan Effektivitas pengembangan PAD Kota Palembang maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bahwa peranan PAD dapat membantu pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Palembang, baik posisinya maupun perkembangannya.
2. Menganalisis upaya sumber penerimaan Daerah Kota Palembang yang bersumber dari PAD.
3. Mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.



### 1.5. Landasan Teori

Tujuan otonomi daerah (Smith, 1985) dalam analisis CSIS yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat yang dibedakan dari dua sisi kepentingan, yaitu Kepentingan Pemerintah Pusat dan Kepentingan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pusat tujuannya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah.

Menurut Suparmoko (1980 : 43) pemerintah memiliki cara-cara untuk mendapatkan uang. Cara-cara tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pajak, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-kasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
2. Retribusi, yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada Negara dimana adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.
3. Keuntungan dari perusahaan Negara
4. Denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah.
5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran perizinan.
6. Pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri.

7. Hadiah, penerimaan Negara dari sumber inoi sifatnya adalah volunteer dengan tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya menurut kamaluddin (1987 : 162) sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dengan cara menggunakan pendekatan intergral yaitu dengan memperhatikan seluruh tabungan yang tersedia baik tabungan pemerintah maupun tabungan perusahaan dan masyarakat.

2. Dengan cara melakukan pendekatan parsial yaitu dengan menghitung pembiayaan pembangunan yang berasal dari pembangunan sumber-sumbernya, disini khusus dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah diperlukan biaya yang pada dasarnya harus didayakan dan digali dari sumber-sumber keuangan daerah sendiri. Keuangan daerah ini juga merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah, agar daerah yang bersangkutan mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, Tjokroamidjoyo dan Mustapididjaya

Selanjutnya jika dilihat dari tujuan ekonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya sama yaitu otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat

serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, paling tidak ada empat parameter yang menjadi faktor penilaian dan perlu di evaluasi pada tingkat keberhasilannya. Keempat factor tersebut adalah (a) kemampuan keuangan daerah, (b) kemampuan sumber daya manusia, (c) kemampuan sumber daya alam, (d) kemampuan institusi (Afattah, 2001 ; 4).

#### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian Damayanti (2000 : 67) tentang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Palembang Sebagai Upaya Pengisian Otonomi mengemukakan bahwa untuk menggali potensi yang ada didaerah tersebut haruslah melibatkan secara langsung seluruh SDM potensial yang ada, dimana penerimaan yang terbesar Pendapatan Asli Daerah adalah pajak yang masih belum bisa diandalkan untuk mencapai kemandirian daerah dan kemajuan yang lebih merata.

Penelitian Arie (2001 : 70) tentang Peranan Penerimaan Pendapatan asli Daerah Terhadap Perekonomian Sumatera Selatan mengemukakan bahwa peranan PAD Sumatera Selatan dalam perekonomian Propinsi Sumatera Selatan tetap mengandalkan Pemerintah Pusat sebagai penunjang dana melalui subsidi dan bantuan yang diberikan.

Penelitian Sujatmoko (2004 : 80) tentang Analisa Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun Anggaran 2002 mengemukakan bahwa dalam perekonomian Surakarta masih rendah, hal ini tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap rata-rata penerimaan daerah yang sebesar 25,89%.

Penelitian Duman (2004 : 107) tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Fungsi Baku Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas mengemukakan bahwa walaupun pendapatan asli daerah masih kecil dalam menunjang pembiayaan fungsi-fungsi baku yang berarti perubahan dalam nilai variabel pendapatan asli daerah mengakibatkan perubahan nilai variabel BRNP.

Penelitian Zahmanidar (2005 : 65) tentang Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu yang menyatakan bahwa proporsi PAD terhadap APBD rata-rata selama kurun waktu sepuluh tahun sebesar tiga persen, sedangkan proporsi PAD ditambah BHPBP terhadap PDRB sebesar tujuh belas persen. Ini menunjukkan penurunan walaupun berfluktuasi dimana ketergantungan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.

## **1.7. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah biaya pengumpulan Pendapatan Asli Daerah efisien, sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sangat efektif, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam pengumpulan Pendapatan Asli Daerah sudah berjalan dengan baik dimana keuangan daerahnya berkembang tiap tahun. Sementara itu hubungan antara PDRB dengan PAD positif.

## **1.8. Metodologi Penelitian**

### **1.8.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan hanya terbatas pada ruang lingkup Daerah Kota Palembang. Pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 1995 – 2004, serta permasalahan yang berhubungan dengan variabel tersebut.

### **1.8.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam mencapai dari pada tujuan dari pada studi ini maka diperlukan data sekunder. Data sekunder yang akan diteliti meliputi pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan pengeluaran Pendapatan Asli Daerah dalam Kota Palembang yang bersumber dari berbagai instansi antara lain : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dan Badan Pusat Statistik serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.



### 1.8.3 Teknik Analisis

Dalam menganalisis masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka untuk menilai sasaran utama terhadap pengelolaan keuangan daerah khususnya pengelolaan penerimaan daerah dengan pengeluaran rutin. Analisis ini menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan / penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

#### A. Tingkat Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Analisis efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk presentase.

#### B. Tingkat Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Semakin besar upaya pajak daerah sekaligus menunjukkan posisi fiskal daerah. Cara menentukan posisi fiskal daerah adalah dengan mencari koefisien elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Semakin elastis PAD suatu daerah, maka struktur PAD didaerah akan semakin baik

### C. Elastisitas fiskal

$$e = \frac{\% \Delta \text{ PAD}}{\% \Delta \text{ PDRB}}$$

Dimana  $e$  = elastisitas

$\Delta$  = perubahan

### D. Ekonometrika

Untuk mengetahui hubungan antara variabel maka penulis menggunakan fungsi Cobb Douglas, selanjutnya fungsi tersebut dijabarkan dalam model regresi linier berganda yaitu menggunakan rumus :

$$\text{Ln } Y = a + \beta \text{ Ln } X_1 + e$$

Dimana :

$Y$  = Pendapatan Asli Daerah

$X_1$  = Produk Domestik Regional Bruto

$\text{Ln}$  = Logaritma natural

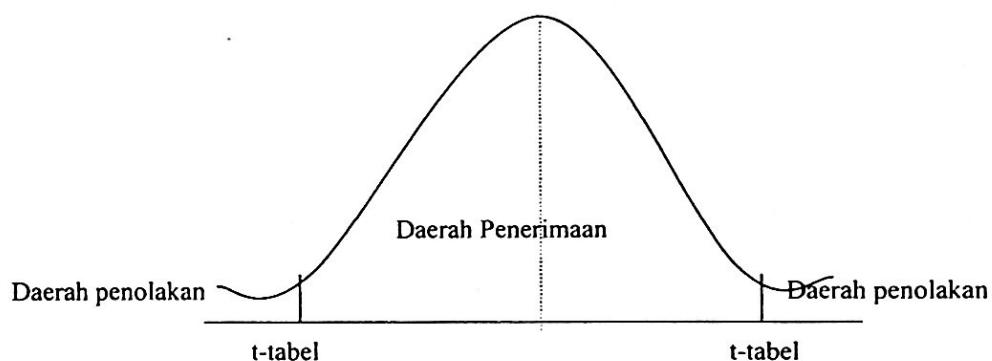
$a$  = Konstanta

$\beta$  = Parameter

$e$  = Standar error

### 1. T- test (Uji T)

Uji ini digunakan untuk memperlihatkan keadaan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat, sehingga kita dapat mengetahui validity persamaan regresi dalam meramalkan kenyataan yang ada yaitu dengan cara membandingkan t-hitung dengan t-tabel, maka  $H_0$  diterima. Apabila t-hitung lebih besar dari t-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan derajat kepercayaan 95% daerah penerimaan.

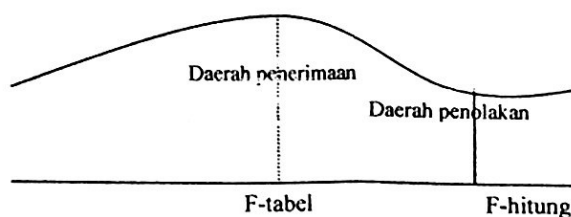


### 2. F- test (Uji F)

Rumusnya adalah :

$$F_n = \frac{\text{Rata-rata kuadrat regresi}}{\text{Rata-rata kesalahan pengganggu}}$$

F hitung ( $F_n$ ) ini kemudian dibandingkan dengan F tabel dan derajat kepercayaan yang digunakan 95% jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel berarti  $H_0$  diterima, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka  $H_a$  diterima. Jika  $H_0$  diterima berarti  $H_a$  ditolak, jika  $H_a$  diterima berarti  $H_0$  ditolak.



#### 1.8.4 Batasan Variabel

Untuk memudahkan didalam memahami dan menganalisis penulisan skripsi ini, juga tidak salah mengintrepsikan, maka penulis memiliki batasan-batasan sebagai berikut, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan asli yang berasal dari daerah tersebut yang terdiri dari pajak, retribusi daerah, penerimaan dinas-dinas, laba perusahaan daerah dan penerimaan-penerimaan lainnya (UU Nomor 25, 1995 ; 119)
2. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Otonomi Daerah, 2001 ; 43)
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Otonomi Daerah, 1999 ; 97)
4. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Otonomi Daerah, 1999 ; 97)

5. Harga Berlaku adalah nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga pada tahun yang bersangkutan, yang berarti termasuk kenaikan harga ikut dihitung.
6. Harga Konstan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar.
7. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu unit-unit produksi dalam periode tertentu selama satu tahun.
8. Effisiensi adalah tingkat perbandingan atau rasio antara output dengan input, semakin besar pengeluarannya maka semakin tinggi Effisiensinya.
9. Efektivitas adalah sebuah ukuran keberhasilan atau kegagalan dari Organisasi atau Instansi dalam mencapai suatu tujuan.
10. Upaya Fiskal adalah semakin tinggi hasil pajak daerah maka sekaligus akan menunjukkan posisi fiskal dengan melihat koefisien antara elastisitas PAD terhadap PDRB.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah* dan No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Tamita Utama. Jakarta, 2004.

Arie, Alfarizi, 2001, *Peranan Penerimaan PAD Terhadap Perekonomian Daerah Sumatera Sealtan*, "Skripsi", Palembang.

Badan Pusat Statistik Kota Palembang. 1994-2004.

Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2001.

Damayanti. Imelda. 2000. *Pengembangan PAD Kotamadya Palembang Sebagai Pengisian Otonomi*, "Skripsi", Palembang

Dinas Pendapatan Kota Palembang Tahun 1994-2004.

Duman, Fachsyal, 2004, *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pembiayaan Fungsi Baku Pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas*, "Tesis", Palembang

Fattah, A, 2001, *Otoda Peluang dan Tantangan Muba*, Artikel, Sumatera Ekpres, 6 Februari 2001, hal;4.

Gudjarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, diterjemahkan : Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta.

Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UGM, Yogyakarta, hal;21.

Hariadi, Sugeng. 2002, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro Dalam Ekonomi*. No:1. Desember. Vol:5, Surabaya.

Ishak, Zulkarnain, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*. FKMM- PKP, 1999.

Kuncoro, Mudrajat, 1995, *Desentralisasi Fiskal di Indonesia Dilema Otonomi Daerah dan Ketergantungan*, No;4, April 1995, Penerbit LP3ES, Jakarta.

Kaho, Yosef riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mohammad, Hatta, *Kumpulan Pidato III*. Inti Jaya Pers 1985, hal:79-80. Jakarta.

Otonomi Daerah. UU No 32 Tahun 2004. *tentang Pemerintahan Daerah*. UU No 33 tahun 2004, *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Tamita Utama, Jakarta, 2004.

Simanjunya, Thamrin, *Analisis Potensi Pendapatan Daerah*.

Sujadmoko, Hidayat, 2004, *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kota Surakarta Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, "Tesis" Surakarta.

Sondakh, L.W. 2003, *Globalisasi dan Desentralisasi : Prospektif Ekonomi Lokal*, SE UI, Jakarta.

Zahmanidar, 2005, *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu*, "skripsi" Palembang.